****

**BUPATI ENREKANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 127 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tk.II (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 1990 Seri D Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Tk. II Enrekang (Lembarana Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 1989 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

 MEMUTUSKAN :

Menetapkan**:** PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Enrekang.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pungutan yang dikenakan atas pemakaian atau penggunaan kekayaan milik daerah.
11. Retribusi Terminal adalah Pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan atas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Villa adalah Pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian dan pelayanan villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

1. Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Jasa Usaha.
2. Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. dengan nama Retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut Retribusi atas pemakaiaan kekayaan daerah;
4. dengan nama Retribusi terminal, dipungut Retribusi atas pelayanan fasilitas terminal;
5. dengan nama Retribusi tempat khusus parkir, dipungut Retribusi atas tempat khusus parkir;
6. dengan nama Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/villa, dipungut Retribusi atas pelayanan penginapan/pesanggrahan/villa;
7. dengan nama Retribusi rumah potong hewan, dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak; dan
8. dengan nama Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

1. Objek Retribusi Pemakaiaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pemakaiaan kekayaan daerah.
2. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Bagian Kedua

Retribusi Terminal

Pasal 4

1. Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang sediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 5

1. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang sediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan yang diperuntukkan khusus bagi PNS yang berada dalam kawasan tertentu.

Bagian Keempat

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 6

1. Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang sediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang sediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Kelima

Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 7

1. Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang sediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang sediakan, dimiliki dan/atau dikelolah oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 8

1. Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Ketujuh

Subjek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 9

1. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
2. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong jasa usaha.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

1. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi
2. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
3. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu

Retribusi Kekayaan Daerah

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaiaan kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemakaian alat berat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJEK | TARIF (Rp) | VOLUME |
| DALAM DAERAH | LUAR DAERAH |
| 1. Buldoser
 | 200.000 |  | / jam |
| 1. Motor Greder
 | 150.000 |  | / jam |
| 1. Whell Loader Padroma
 | 150.000 |  | / jam |
| 1. Tire Roller
 | 200.000 |  | / jam |
| 1. Motor Walls 8 Ton
 | 200.000 |  | / hari |
| 1. Motor Walls 6 Ton
 | 200.000 |  | / hari |
| 1. Wall Tangan ½ Ton
 | 100.000 |  | / hari |
| 1. Compressor
 | 200.000 |  | / hari |
| 1. Aspal Sprayer
 | 400.000 |  | / hari |
| 1. Dump Truck Toyota
 | 150.000 |  | / hari |
| 1. Dump Truck Izusu/Mitsubishi
 | 150.000 |  | / hari |
| 1. Dump Truck raksasa
 | 150.000 |  | / hari |
| 1. Generator
 | 100.000 |  | / hari |
| 1. Mesin Las
 | 300.000 |  | / hari |
| 1. Mobil Tangki ( 5.000 Liter )
 |  |  |  |
| * 0 s/d 20 Km
 | 150.000 |  | / tangki |
| * 21 Km ke atas
 | 200.000 |  | / tangki |
| 1. Pompa Air
 | 100.000 |  | / hari |
| 1. Excavator
 |  |  |  |
|  - Pc-200 | 250.000 |  |  |
|  - Pc-100 | 150.000 |  |  |
| 1. Vibrator Roller 6 ½ Ton s/d 12 Ton
 | 1.500.000 |  | / hari |
| 1. Baby Rorrel 2,5 Ton
 | 400.000 |  | / hari |
| 1. Tronton/Plat Bed (Dalam Daerah)
 |  |  |  |
| * 0 s/d 20 Km
 | 750.000 |  | / Ret |
| * 21 Km ke atas
 | 1.000.000 |  | / Ret |
| 1. Tronton/Plat Bed (Luar Daerah)
 | 2.000.000 |  | / Ret |
| 1. Hand mini roller
 |  |  |  |
|  500 Kg s/d 1000 kg | 500.000 |  | / hari |
| 1. Alat mekanisasi pertanian (Traktor)
 | 1000.000 |  | / Hektar, dengan jenis& volume kerja 2 kali luku dan dua kali hero |
| 1. Cutter beton
 | 200.000 |  | / hari |
| 1. Jack hammer
 | 200.000 |  | / hari |
| 1. Stumper
 | 200.000 |  | / hari |
| 1. Gerinda duduk/pemotong besi
 | 100.000 |  | / hari |

2. Pemakaian Laboratorium Jalan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJEK | TARIF (Rp) | VOLUME |
| 1. Pemeriksaan lapangan bagi material
 |  |  |
|  Jalan ( Standar 50/m ) |  |  |
| 1. CBR tanah dasar (DPC)
 | 25.000 | / titik |
| 1. Sandcone tanah timbunan
 | 20.000 | / titik |
| 1. Sandcone LPB
 | 30.000 | / titik |
| 1. Sandcone LPA
 | 30.000 | / titik |
| 1. CBR LPB
 | 25.000 | / titik |
| 1. CBR LPA
 | 25.000 | / titik |
| 1. Coredrill
 | 25.000 | / titik |
| 1. Test Tack Coat/Prime Coat
 | 15.000 | / titik |
| 1. Bor mesin untuk tnah/m
 | 80.000 | / titik |
| 1. Bor mesin untuk batu/m
 | 150.000 | / titik |
| 1. Struktur kuat tekan kubus/selinder
 | 15.000 | / buah |
| 1. Kuat tekan dengan hammer test/10 x dalam 6 sekmen
 | 45.000 |  |
| 1. Bantahan karet (2 buah per jembatan
 |  80.000 |  |
| 1. Sampel LPB
 | 700.000 |  |
| 1. Sampl LPA
 | 700.000 |  |
| 1. Sampel ATB/HRAS/AC
 | 750.000 |  |
| 1. Pengujian sampel hasil pemeriksaan lapangan (CUTTER)
 |  |  |
| 1. Gradasi
 | 100.000 | /km/6 titik |
| 1. Extracsi
 | 200.000 | /km/6 titik |
| 1. Pemeriksaan lapen di lapangan (CUTTER )
 |  |  |
| Cutter ( Test Pit ) | 125.000 | / 1 kali uji |
| 1. Pemboran mesin di lapangan
 |  |  |
| 1. Pengambilan contoh tanah
 | 25.000 | / 1 kali uji |
| 1. SPT ( Sondir )
 | 25.000 | / 1 kali uji |
| 1. Pemboran mesin ( Tanah ) m
 | 100.000 | / 1 kali uji |
| 1. Pemboran mesin ( Batu ) m
 | 100.000 | / 1 kali uji |
| 1. Harga Job Mix Formula ATB/HRS/AC
 |  |  |
|  (batu pecah, kerikil, sirtu dan tanah) |  |  |
| 1. Ayakan
 | 50.000 | 3 x uji |
| 1. Berat Jenis
 | 35.000 | 2 x uji |
| 1. Berat Isi
 | 30.000 | 3 x uji |
| 1. Abrasi
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Kepipihan
 | 50.000 | 3 x uji |
| 1. Soundness
 | 100.000 | 2 x uji |
| 1. Sand Equvalent
 | 15.000 | 1 x uji |
| 1. Kadar air
 | 20.000 | 3 x uji |
| 1. Mix design
 | 200.000 | 1 x uji |
| 1. Viscositas
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Penyulungan
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Penetrasi
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Daktilitas
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Kelarutan CCL4
 | 10.000 | 1 x uji |
| 1. Berat jenis aspal
 | 10.000 | 1 x uji |
| 1. Titik nyala
 | 15.000 | 1 x uji |
| 1. Kelekatan Agregat
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Kadar air aspal
 | 15.000 | 1 x uji |
| 1. Destilasi
 | 25.000 | 1 x uji |
| 1. Residu aspal
 | 25.000 | 1 x uji |
| 1. Pengendapan
 | 25.000 | 1 x uji |
| 1. Kelekatan aspal terhadap batu keras
 | 15.000 | 1 x uji |
| 1. Kelekatan aspal terhadap pengadukan
 | 15.000 | 1 x uji |
| 1. Analisa saringan
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Pengambilan aspal dari drum
 | 50.000 | 1 x uji |
| 1. Mix formula LPA (batu pecah, sirtu & tanah)
 |  |  |
| 1. Ayakan
 | 70.000 | 4 x uji |
| 1. Berat jenis
 | 50.000 | 3 x uji |
| 1. Berat isi
 | 10.000 | 3 x uji |
| 1. Abrasi
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Alterberg
 | 25.000 | 2 x uji |
|  6. Kepipihan | 50.000 | 2 x uji |
| 1. Soundness
 | 100.000 | 2 x uji |
| 1. Send equivalent
 | 15.000 | 1 x uji |
| 1. Kadar air
 | 20.000 | 3 x uji |
| 1. Mix pemadatan
 | 150.000 | 1 x uji |
| 1. Design CBR
 | 150.000 | 1 x uji |
| 1. Mix formula LPB (Batu pecah, sirtu & tanah)
 |  |  |
| 1. Ayakan
 | 50.000 | 3 x uji |
| 1. Berat jenis
 | 50.000 | 3 x uji |
| 1. Berat isi
 | 30.000 | 3 x uji |
| 1. Abrasi
 | 35.000 | 2 x uji |
| 1. Alterberg
 | 30.000 | 2 x uji |
| 1. Kepipihan
 | 35.000 | 2 x uji |
| 1. Soundness
 | 100.000 | 2 x uji |
| 1. Send equivalent
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Kadar air
 | 20.000 | 3 x uji |
| 1. Mix pemadatan
 | 150.000 | 1 x uji |
| 1. Design CBR
 | 150.000 | 1 x uji |
| 1. Pengujian lapen (Batu pecah,Kerikil, Sirtu & Tanah)
 |  |  |
| 1. Ayakan
 | 50.000 | 3 x uji |
| 1. Berat jenis
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Berat isi
 | 30.000 | 3 x uji |
| 1. Abrasi
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Kepipihan
 | 50.000 | 3 x uji |
| 1. Soundness
 | 50.000 | 1 x uji |
| 1. Viskositas
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Penyulingan
 | 25.000 | 1 x uji |
| 1. Penetrasi
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Daktilitas
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Kelarutan CCL4
 | 10.000 | 1 x uji |
| 1. Berat jenis aspal
 | 10.000 | 1 x uji |
| 1. Titik nyala
 | 15.000 | 1 x uji |
| 1. Kelekatan agregat
 | 15.000 | 1 x uji |
| 1. Kadar air aspal
 | 15.000 | 1 x uji |
| 1. Destilasi
 | 25.000 | 1 x uji |
| 1. Residu aspal
 | 25.000 | 1 x uji |
| 1. Pengendapan
 | 25.000 | 1 x uji |
| 1. Kelekatan aspal terhadap agragat keras
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Kelekatan aspal terhadap pengadukan
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Analisa saringan
 | 15.000 | 1 x uji |
| 1. Pengambilan aspal dari drum
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Mix formula beton K
 |  |  |
| 1. Ayakan
 | 50.000 | 3 x uji |
| 1. Berat jenis
 | 35.000 | 2 x uji |
| 1. Berat isi
 | 20.000 | 2 x uji |
| 1. Abrasi
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Kadar lumpur
 | 20.000 | 2 x uji |
| 1. Kadar organic
 | 10.000 | 1 x uji |
| 1. Mix design
 | 150.000 | 1 x uji |
| 1. Modifikasi/set
 | 50.000 | 1 x uji |
| 1. Soundness kasar
 | 60.000 | 1 x uji |
| 1. Soundness halus
 | 50.000 | 1 x uji |
| 1. Sand equivalent
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. PH air
 | 10.000 | 1 x uji |
| 1. Konsisten normal semen
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Kuat tekan mortal
 | 10.000 | 1 x uji |
| 1. Berat jenis semen
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Pengikatan awal semen
 | 20.000 | 1 x uji |
| 1. Kadar air semen
 | 10.000 | 1 x uji |
| 1. Bobot isi
 | 10.000 | 1 x uji |
| 1. Ketetapan bentuk
 | 10.000 | 1 x uji |
| 1. Kehalusan semen
 | 25.000 | 1 x uji |
| 1. Kekuatan tekan kubus
 | 70.000 | 12 x uji |
| 1. Pengujian material sub grade
 |  |  |
| 1. Ayakan
 | 20.000 | / 1 x uji |
| 1. Berat jenis
 | 20.000 | / 1 x uji |
| 1. Berat isi
 | 10.000 | / 1 x uji |
| 1. Alterberg
 | 20.000 | / 1 x uji |
| 1. Kadar air
 | 10.000 | / 1 x uji |
| 1. Pemadatan tanah biasa
 | 10.000 | / 1 x uji |
| 1. Pemadatan tanah pilihan
 | 60.000 | / 1 x uji |
| 1. Design CBR
 | 150.000 | / 1 x uji |
| 1. Pengujian tanah hasil boring
 |  |  |
| 1. Ayakan
 | 20.000 | / 1 x uji |
| 1. Berat jenis
 | 20.000 | / 1 x uji |
| 1. Berat isi
 | 10.000 | / 1 x uji |
| 1. Alterberg
 | 20.000 | / 1 x uji |
| 1. Kadar air
 | 10.000 | / 1 x uji |
| 1. Pengujian CBR tanah dasar dengan alat DCP dilakukan maksimal 200 m/titik
 |  |  |
| 1. Dinamic cone penetrometer
 | 100.000 | / 5 x uji |
| 1. Perhitungan hasil pengujian
 | 10.000 | / 5 x uji |
| 1. Pengujian sampel hasil pemeriksaan lapangan (sendcome) dilakukan maksimal 200 m/titik
 |  |  |
| 1. Gradasi
 | 100.000 | / 5 x uji |
| 1. Kadar air
 | 30.000 | / 5 x uji |
| 1. Alterberg
 | 160.000 | / 5 x uji |
| 1. Pemadatan
 | 150.000 | / 1 x uji |
| 1. CBR
 | 150.000 | / 1 x uji |
| 1. Pengujian sampel hasil pemeriksaan lapangan (coredrill) dilakukan perkilometer/11 titik
 |  |  |
| 1. Gradasi
 | 200.000 | / km |
| 1. Extraksi
 | 400.000 | / km |
| 1. Pengujian kadar aspal prime coat dan tack coat dilakukan maksimal 200 m/5 titik
 |  |  |
| 1. Pengujian prime coat
 | 75.000 | / 5 titik |
| 1. Pengujian tack coat
 | 75.000 | / 5 titik |

1. Sub Terminal Agribisnis (STA)
2. Kendaraan :

1. Roda Empat

 a) Dalam Daerah Rp. 250.000,-/hari

 b) Luar Daerah Rp. 400.000,-/hari

2. Roda Enam

1. Dalam Daerah Rp. 300.000,-/hari
2. Luar Daerah Rp. 600.000,-/hari

b. Lods Rp. 35.000.-/bulan

c. Timbangan Rp. 25.000,-/bulan

 d. Kantin Rp. 15.000,-/bulan

1. Pemakaian Laboratorium (Pemeriksaan Kwalitas Air)
2. Air Limbah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Parameter | Tarif (Rp) |
| 1. | Fisika |  |
|  | a. Suhu | 2.500 |
|  | b. Zat Padat Terlarut (TDS)  | 8.000 |
|  | c. Bau | 2.500 |
|  | d. Rasa | 2.500 |
|  | e. Warna | 2.500 |
|  | f. kekeruhan | 4.500 |
| 2. | Kimia Anorganik |  |
|  | a. Sisaklor (CL2) | 20.000 |
|  | b. kesadahan Caco3 | 15.000 |
|  | c. Nitrit (NO2N) | 13.500 |
|  | d. Nitrat (NO3)  | 30.000 |
|  | e. Besi / Fe | 15.000 |
|  | f. Kadmium (Cd) | 45.000 |
|  | g. Fluorida (F) | 63.000 |
|  | h. Kromium  | 15.000 |
|  | i. Mangan (Mn) | 15.000 |
|  | j. Sianida (S) | 21.000 |
|  | k. Selenium (Se) | 54.000 |
|  | l. Sulfat (SO4) | 63.000 |
|  | m. Zink | 45.000 |
|  | n. Zulfida | 51.000 |
|  | o. Total Caliform | 15.000 |
|  | p. BOD | 30.000 |
|  | q. COD | 72.000 |

1. Air Bersih

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Parameter | Tarif (Rp) |
| 1. | Fisika |  |
|  | a. Bau | 2.500 |
|  | b. Rasa | 2.500 |
|  | c. Suhu | 2.500 |
|  | d. Warna | 2.500 |
|  | e. Zat Padat Terlarut | 8.000 |
| 2. | Kimia Anorganik |  |
|  | a. Besi (Fe) | 15.000 |
|  | b. Fluorida (F) | 63.000 |
|  | c. Kromium (Cr) | 15.000 |
|  | d. Magan (Mn) | 15.000 |
|  | e. Nitrit | 30.000 |
|  | f . Nitrat | 15.000 |
|  | g. Sianida | 21.000 |
|  | h. Zink | 45.000 |
|  | i. Kesadahan Caco3 | 15.000 |
|  | j. Sulfat | 63.000 |
|  | k. Kadmium (Cd) | 45.000 |
|  | l. Selenium (Se) | 54.000 |
|  | m. zulfida | 51.000 |
|  | n. Sisaklor (CL2) | 20.000 |
|  | o. Total Caliform | 15.000 |

1. Air Minum (PAM & Air Isi Ulang)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N0 | Parameter | Tarif (Rp) |
| 1. | Fisika |  |
|  | a. Bau | 2.500 |
|  | b. Rasa | 2.500 |
|  | c .Suhu | 2.500 |
|  | d. Warna | 2.500 |
|  | e. kekeruhan | 4.500 |
|  | f . Zat Padat Terlarut (TDS)  | 8.000 |
| 2. | Kimia Anorganik |  |
|  | a. Kesadahan Caco3 | 15.000 |
|  | b. Nitrit | 13.500 |
|  | c. Nitrat | 30.000 |
|  | d. Besi (Fe) | 15.000 |
|  | e. Sisaklor (CL2)  | 20.000 |
|  | f. Arsen (Ar) | 36.000 |
|  | g. kadmium (Cd) | 45.000 |
|  | h. Fluorida (F) | 63.000 |
|  | i. Kromium | 15.000 |
|  | j. Aluminium (AL) | 45.000 |
|  | k. Magan (Mn) | 15.000 |
|  | l. Tembaga (Cu) | 45.000 |
|  | m. sianida (S) | 21.000 |
|  | n. klorida (Cl2) | 35.000 |
|  | o. Selenium (Se) | 54.000 |
|  | P. Sulfat | 63.000 |
|  | q. Amoniak | 51.000 |
|  | r. Barium (Bo) | 45.000 |
|  | s.Kolitinja | 15.000 |
|  | t .Total Caliform | 15.000 |

1. Air Kolam Renang & Permandian Umum

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Parameter | Tarif (Rp) |
| 1. | Bau | 2.500 |
| 2. | Rasa | 2.500 |
| 3. | Suhu | 2.500 |
| 4. | Warna | 2.500 |
| 5. | Daya hantar Listrik  | 2.500 |
| 6. | Derajat Keasaman (PH) | 5.500 |
| 7. | Sisaklor (CL2) | 20.000 |
| 8. | Kesadahan Caco3 | 15.000 |
| 9. | Zat Organik (Kmno4) | 13.500 |
| 10. | Zat Padat Terlarut (TDS) | 8.000 |
| 11. | Besi/Fe | 15.000 |
| 12. | Tembaga (Cu) | 45.000 |
| 13. | BOD | 30.000 |
| 14. | Kolitinja | 15.000 |
| 15. | Total Koliform | 15.000 |

1. Penyewaan Bus
2. Dalam daerah Rp. 300.000,-
3. Luar daerah Rp. 600.000,-

Bagian Kedua

Retribusi Terminal

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

1. Kendaraan Umum

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JENIS KENDARAAN | TARIF (RP) |
| 1.2.3. | Angkutan antar kota antar ProvinsiAngkutan antar Kota dalam ProvinsiAngkutan Pedesaan | 1.000,-1.000,- 500,- |

1. Sarana/Fasilitas Penunjang

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | JENIS JASA/PELAYANAN | JENIS FASILITAS/SARANA | TARIF (RP) |
| 1.2. | Tempat kegiatan usahaPemakaian fasilitas lainnya | Kios :1. Terminal Induk
2. Terminal Tipe C (Kec.)
3. Parkir kendaraan
4. Mobil
5. Motor
6. Pemakaian fasilitas toilet :
7. Buang air kecil;
8. Buang air besar/mandi
9. Pelataran
 | 3.000,/m2/bulan2.500/m2/bulan2.000,-/jam1.000,-/jam1.000,-2.000,-500/m2/hari |

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | JENIS TEMPAT PARKIR | JENIS KENDARAAN BERMOTOR | TARIF (RP) |
| 1. | Pelataran/Lingkungan | 1. a. Sedan, Jeep, Pik up dan Mini bus
2. Bus, Truck dan alat besar lainnya
3. Sepeda motor
 | 3.000,-4.000,-2.000,- |

Bagian Keempat

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 16

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :
2. Kamar
3. Umum
4. Kamar Deluxe Rp. 350.000,-/kamar
5. Kamar Exekutive Rp. 450.000,-/kamar

2. Pemerintah Daerah

1. Kamar Deluxe Rp. 300.000,-/kamar
2. Kamar Exekutive Rp. 400.000,-/kamar
3. Ruang Rapat
4. Umum Rp. 900.000,-/hari
5. Pemerintah Daerah Rp. 500.000,-/hari
6. Pemakaian kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi dari 2 (dua) orang dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 25.000 perorangan dan Ekstrabed sebesar Rp. 75.000.

Pasal 17

Acara yang dimeriahkan dengan alat musik (Band dan Elekton) yang memakai jasa Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 300.000 untuk Band dan Elekton sebesar Rp. 250.000

Bagian Kelima

Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | JASA PELAYANAN | JENIS TERNAK | TARIF (Rp) |
| 1 | Pemotongan hewan1. Pemotongan usaha
2. Pemotongan hajat
3. Pemotongan darurat
 | * Sapi, Kerbau dan Kuda

 (betina)* Sapi, Kerbau dan Kuda (jantan)
* Kambing dan Domba (betina)
* Kambing dan Domba (jantan)
* Sapi, Kerbau dan Kuda

 (betina)* Sapi, Kerbau dan Kuda

 (jantan)* Kambing dan Domba (betina)
* Kambing dan Domba (jantan)
* Sapi, Kerbau dan Kuda

 (betina)* Sapi, Kerbau dan Kuda

 (jantan)* Kambing dan Domba
 | 35.000/ekor30.000/ekor 7.500/ekor 5.000/ekor35.000/ekor30.000/ekor7.500/ekor5.000/ekor20.000/ekor10.000/ekor 5.000/ekor |

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | TEMPATPELAYANAN | JENIS PELAYANAN | GOL. TARIF | TARIF (RP) |
| 1.2.3. | Tempat rekreasi1. Objek wisata Permandian Alam Lewaja
2. Objek wisata Permandian Alam Sarassa
3. Objek wisata Alam
4. Makam Puang Leoran
5. Gua Pusallo
6. Gua Tampaan
7. Lo’ko Malilin
8. BambaPuang
9. Tapak Tangan Berdarah
10. Benteng Alla
11. Lo’ko Lumbang
12. Makam Ma’dea Batu
13. Makam Batu Tontonan
14. No Smoking Village, Bone-Bone
15. Gua Ba’ka
16. Lo’ko Bubau
17. Keramik Tapong
18. Air Terjun Lagandang
19. Air Terjun Labai

Tempat Olahraga1. Stadion
2. GOR/satu kali pakai
3. Lapangan/

Tribun Abu Bakar LambogoKios kompleks olahraga | Masuk kawasanMasuk kawasanMasuk Kawasan1. Sewa stadion untuk olahraga (lampu stadion ditanggung penyewa)
2. Sewa untuk non olahraga (lampu stadion ditanggung penyewa)
3. Sewa olahraga
4. Sewa untuk non olahraga

Sewa non olahragaSewa | * Dewasa
* Anak-anak
* Dewasa
* Anak-anak

 komersialnon komersial* siang
* Malam
* Pagi
* Sore
* Malam
* Non komersil
* Kegiatan parpol
* Artis/

komersil* Hari
* Bulan
 | 7.000,-5.000,-5.000,-3.000,-5.000,-5.000,-5.000,-5.000,-5.000,-5.000,-5.000,-5.000,-5.000,-5.000,-5.000,-5.000,-5.000,-5.000,-5.000,-5.000,-5.000400.000,-perhari300.000,-perhari200.000,-perhari100.000100.000500.000750.000 1.500.000500.0003.000.005.000.00025.000250.000 |

Pasal 20

1. Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
2. Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi dipungut di wilayah/tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa yang diberikan.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, ANGSURAN

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 22

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan
3. Tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 23

1. Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
2. SPORD sebagaimana dengan dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
3. Berdasarkan SPORD sebagaimana dengan dimaksud pada ayat (2) ditetapakan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 24

1. Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam 1 (satu) kali pembayaran.
2. Apabila Wajib Retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsuran.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
2. Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
3. Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi, tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 26

Penagihan Retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 27

1. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
2. Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
	1. diterbitkan surat Teguran; atau
	2. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
4. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
5. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2. Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 29

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
4. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
5. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
6. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
7. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
8. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
9. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
10. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
11. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
12. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
13. menghentikan penyidikan; dan/atau
14. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

 Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku

1. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2000 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 12);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2001 Nomor 7);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2001 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Atas Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2001 Nomor 21);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2001 Nomor 25);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Di Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2007 Nomor 4);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

 Ditetapkan di Enrekang

 pada tanggal 28 Desember 2011

 BUPATI ENREKANG,

 ttd

 HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

 ttd

MUHAMMAD AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2011 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

HAMING, SH

NIP. 19700502 199803 1 011